

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

India adalah salah satu negara di Asia Selatan yang memiliki total jumlah penduduk \pm 846.302.691 jiwa. Dalam jumlah yang sangat besar tersebut, India merupakan negara plural dimana didalamnya terbagi oleh beragam jenis ras dan agama. Dengan adanya pluralisme tersebut hubungan antara berbagai lapisan etnis bervariasi dari dominasi dan genoside hingga berbagai bentuk akomodasi serta kekuasaan. Hal ini memunculkan perbedaan yang tajam dan saling tumpang tindihnya pola pemukiman serta pembagian kesejahteraan ekonomi dimana menjadikannya sebagai persoalan yang lebih problematik.

Sejak terbentuknya India dan Pakistan sebagai dua negara terpisah pada tahun 1948, muncullah konflik hebat mengenai status siapa yang paling berhak menguasai Khasmir. Konflik ini juga merupakan tanda terjadinya konflik agama yang melibatkan dominasi Hindu India melawan Muslim Pakistan. Dan pada tahun 1969, dua negara ini mendekati situasi perang dimana rute penyerangan melewati batas wilayah kaum Muslim sampai daerah Kargil yang merupakan perbatasan Khasmir dan India.

Hal ini berdampak negatif dalam kehidupan sosial politik masyarakat di India secara general. Seperti konflik yang berbau komunal dan beraroma primordial terutama yang berkaitan dengan sentimen keagamaan, baik yang

terjadi di lingkungan internal mayoritas Hindu maupun dalam kerangka eksternal hubungan Hindu dengan kelompok minoritas lainnya yaitu Muslim dan Sikh.

Kaum Muslim India sebagai kelompok minoritas di India yang hanya memiliki prosentase jumlah penduduk 23% dari seluruh jumlah penduduk India dan sebagian besar mendiami propinsi bagian utara India yang sangat berdekatan dengan daerah konflik Khasmir. Konflik komunalpun sering terjadi disini dan yang paling besar adalah terjadinya tragedi Ayodhya, yaitu pengrusakan Masjid Babri di Ayodhya pada bulan Desember 1992 oleh kaum mayoritas Hindu. Dari tragedi ini berlanjut lagi dengan terjadinya kerusuhan komunal di Bombay pada awal tahun 1993 yang memakan korban jiwa 2000 orang. Ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah India untuk menyelesaikannya selain masalah Pakistan dan Khasmir yang juga merupakan pemicu munculnya konflik komunal di India dimana umat Muslim sering dijadikan sasaran.

Pesta demokrasi atau Pemilu di India sebagai implementasi kehidupan sosial politik pun sering didominasi oleh kaum mayoritas, sehingga peran kaum minoritas tak tampak. Tapi mengacu pada Pemilu tahun 1999 di India yang menempatkan **Bharatiya Janata Party (BJP)** sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak dan berhak memegang puncak kekuasaan selanjutnya dengan menawarkan kebijakan-kebijakan sangat melindungi hak-hak kaum minoritas Muslim seperti penghapusan UU yang melindungi diskriminasi pernikahan kaum Muslim, perceraian dan hal-hal yang menyertainya. Boleh jadi ini hanya cara untuk memuluskan jalan pemerintahan BJP dengan mengambil simpati pada

kaum minoritas terutama kaum Muslim. Tapi kaum Muslim tetap memberikan reaksi baik positif dan negatif.

Hal-hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang upaya kaum minoritas Muslim dalam mengantisipasi konflik komunal yang sering terjadi demi mempertahankan konsistensinya. Selain itu juga ada mengenai upaya kaum Muslim untuk memperjuangkan hak-hanya dalam percaturan politik di India yang tentunya akan mempengaruhi posisi mereka dalam kehidupan sosial politik terutama pasca pemilu 1999 dan untuk itulah tulisan ini diberi judul “ **UPAYA KAUM MINORITAS MUSLIM UNTUK MEMPEROLEH HAK-HAKNYA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK DI INDIA PASCA PEMILU 1999** “.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dan kegunaan akademis yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah melakukan identifikasi dan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan upaya kaum minoritas Muslim untuk memperoleh kembali hak-haknya sebagai warga Negara didalam kehidupan sosial di India pasca Pemilu 1999.

Dan pada umumnya tujuan penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Agama Islam pertama kali masuk ke India pada abad ke-VII (tujuh). Islam diperkenalkan di anak benua India dalam bentuk sebuah peradaban yang telah berkembang yang diwarnai dengan budaya pertanian (agrikultur), urbanisasi dan keagamaan yang terorganisir secara mapan. Sedangkan pada saat itu peradaban India diwarnai dengan sistem kasta, yaitu Hinduisme Brahmatik dan keyakinan Budha, serta diwarnai dengan dominasi elite politik Rajput dan elite politik Hindu lainnya. Pada abad tersebut di India terdapat beberapa imperium besar, tetapi menjelang invansi Muslim, India terpecah-pecah menjadi pemerintahan lokal. Penaklukan Muslim melahirkan sebuah elite baru dan sebuah tingkat integrasi politik dan menjadi awal proses berkembangnya sebuah peradaban Muslim yang khas. Kualitas kultural yang dalam peradaban Islam-India, kecenderungan otonomi dan pluralitas keagamaan menjadikannya sebuah varian yang khas dari pola Islam Universal.

Latar belakang spektrum etnis India memiliki mosaik sosial yang sangat kompleks dan berwarna. Tetapi meskipun ditandai oleh perbedaan dan keanekaragaman budaya yang sangat luas, mosaik ini tidak saling berbenturan. Karena memiliki pola yang dapat dikenali secara jelas, dimana perbedaan sosial budaya menggambarannya sebagai suatu kekuatan dan pemberian dari budaya India yang majemuk serta dorongan peradaban. Budaya ini telah berkembang lebih dari satu abad melalui proses asimilasi dan amalgamasi perbedaan budaya yang masuk bersama kaum penjajah seperti bangsa Arya, Saka, Hun, Pahan, Moghul dan bangsa-bangsa Eropa. Demikianlah perkembangan budaya India

yang majemuk tidak bisa dibandingkan dengan peleburan yang terjadi pada masyarakat Amerika ataupun dengan negara multinasional seperti digambarkan oleh bekas Uni Sovyet. Mosaik sosial budaya India adalah gambaran sesungguhnya “*kesatuan dalam perbedaan*”, seperti karangan bunga atau aneka ragam sayuran dalam semangkok salad, dimana setiap komponennya saling menjaga identitas masing-masing, adalah bagian secara keseluruhan.¹

Perbedaan budaya adalah dasar nyata masyarakat multietnis di India yang didalamnya meliputi unsur-unsur budaya seperti bahasa, ras, suku bangsa, agama dan wilayah. Kondisi ini sering dipakai sebagai identitas untuk menguntungkan kelompok-kelompok etnis tertentu dan pergerakan mereka. Dalam kebanyakan kelompok-kelompok etnis, lebih dari satu unsur budaya yang berhubungan dengan identifikasi. Dengan kata lain, komunitas etnis India memiliki bermacam-macam bagian dan dimensi. Identitas komunitas etnis yang majemuk telah dibingungkan oleh adanya penipuan perbedaan kelas, tidak hanya antara satu dan komunitas etnis lain, tetapi juga dengan yang lain.² Dalam beraneka ragam bagian, kemajemukan identitas yang tidak berlapis telah memberi kesempatan pada kelompok-kelompok etnis untuk mempertahankan dan membentuk kembali unsur-unsur budaya mereka demi kemajuan pemikiran obyektif mereka.

Dua hal yang secara bersamaan disepakati sebagai bagian dari spektrum perbedaan etnis di India patut mendapatkan perhatian. Hal yang pertama

¹ Rashiduddin Khan, *Federal India: A Design for Change* (New Delhi: Vikas, 1992).

² Marguerite Ross Barnett, *The Politics of Cultural Nationalism In South India* (Princeton: Princeton University Press, 1976).

adalah tidak ada pola subordinat dominan antara kelompok-kelompok etnis.³ Demikianlah pola-pola konflik dan pertentangan antar komunitas etnis yang telah tergantung oleh skala waktu dan tempat. Kedua, kelompok-kelompok etnis tidak memiliki batas-batas kekuasaan yang jelas dikarenakan pengidentifikasian batasan-batasan budaya sebagai kelompok dilakukan tidak bersamaan dengan penentuan batas-batas wilayah.⁴ Oleh karena itu, masyarakat merujuk kepada hal-hal khusus seperti agama, suku, kasta, ras dan bahasa yang telah ditemukan tersebar di berbagai wilayah kekuasaan.

India dengan total jumlah penduduk \pm 846.302.691 jiwa terbagi kedalam kelompok-kelompok linguistik dan religius. Kelompok linguistik tersebut terdiri dari Hindu, Marathi, Telugu, Tamil, Bengali, Gujarati, Kannada, Orriya dan Assam. Sedangkan kelompok religius dapat dilihat dari data berikut:

³ Samina Ahmed, "The Politics of Ethnicity in India", *Regional Studies* (Islamabad) IX, IV (Autumn 1991), hlm. 22-50.

⁴ David Washbrook, "Ethnicity in Contemporary Indian Politics", *South Asia: Sociology of "Developing Societies"*, ed. Hamza Alavi and John Harris (London: Macmillan, 1989), hlm. 74-86.

Table 1. Jumlah penduduk India dalam kelompok Religius

Kelompok Religius	1961	1971	1981	1991
Hindu	366.526.871	453.436.631	549.799.478	687.646.720
Muslim	46.940.780	61.418.274	75.512.437	101.596.058
Kristen	10.728.087	14.225.049	16.165.452	19.640.282
Sikh	7.845.922	10.378.891	13.078.153	16.259.739
Budha	3.256.039	3.874.939	4.719.801	6.387.500
Jain	2.027.281	2.604.840	3.206.039	3.352.751
Lain-lain	1.611.938	2.184.961	2.766.290	-----
TOTAL	438.936.920	548.123.573	665.227.630	840.302.691

Sumber : The Data for J&K for 1991 is extrapolated. Parsis: 1991

Dilihat dari tabel diatas bahwa sebagai kelompok mayoritas adalah Hindu, sedangkan kaum Muslim India sebagai kelompok minoritas dengan jumlah dalam prosentase yaitu 23% dari seluruh jumlah penduduk India. Kaum Muslim India sebagian besar mendiami daerah propinsi bagian utara India yang mana sangat berdekatan dengan daerah konflik yaitu Khasmir. Konflik yang berbau komunal dan primordial terutama yang berkaitan dengan sentimen keagamaan sering muncul dipermukaan dan menyebar dalam spektrum politik di India, baik yang terjadi dalam internal mayoritas Hindu maupun pada kerangka eksternal hubungan Hindu dengan kelompok minoritas lainnya terutama Muslim dan Sikh.

Fakta menyatakan bahwa ketajaman batas etnis dan konflik-konflik di India sedang dalam peningkatan dimana hal ini tidak dapat disangkal. Hasil

penelitian lapangan menunjukkan adanya peningkatan jumlah kerusuhan yang terjadi dan kenaikan jumlah korban yang terbunuh dalam kerusuhan telah menjadi peringatan sejak tahun 1985, seperti dapat dilihat dari data berikut:

Table 2. Peningkatan jumlah konflik komunal dan jumlah korban

Tahun	Konflik komunal	Korban Tewas	Korban Terluka
1955	75	24 orang	475 orang
1965	173	34 orang	758 orang
1975	205	33 orang	890 orang
1985	525	328 orang	3665 orang

Sumber : S. K. Gosh, "The Changing Faces of Comunal Riots", *The Hindustan Times* (New Delhi), Sunday Magazine section, 31 May, 1992.

Pada tahun 1985, daerah pedalaman yang hingga kini bertanggung jawab atas terjadinya 46% kerusuhan komunal. Peningkatan kerusuhan komunal yang terjadi telah bertahan menjadi tragedi sangat awet. Pada tahun 1989 telah terjadi 18 kerusuhan besar, yang mana telah memakan korban jiwa sebanyak 1.174 orang. Jumlah korban tewas pada tahun 1989 tercatat sebanyak 418 orang, 383 orang tewas pada peristiwa tahun 1987, 223 orang pada tahun 1989 dan 693 orang tewas pada tahun 1990.⁵ Dan konflik terbesarnya adalah terjadinya tragedi Ayodhya, yaitu pengrusakan Masjid Babri di Ayodhya pada bulan Desember tahun

⁵ Asghar Ali Engineer (ed.), *Comunal Riots in Post Independence India* (New Delhi: Sangam Publications, 1984).

1992 oleh kaum militan Hindu. Masjid Babri ini merupakan masjid kebanggaan umat Islam dan dianggap suci karena menyimpan jenggot Nabi Muhammad SAW, sedangkan bagi umat Hindu masjid tersebut tidak layak berada disitu karena berdiri diatas tanah dimana dahulu berdiri kuil Dewa Rama. Dari tragedi ini masih berlanjut lagi dengan terjadinya kerusuhan komunal (gerakan anti-Muslim) di Bombay pada awal tahun 1993 yang memakan korban jiwa 2000 orang dan ini tercatat sebagai konflik paling brutal yang pernah terjadi. Kepentingan-kepentingan politik ikut berperan dalam terjadinya konflik-konflik tersebut, dimana sebenarnya kepentingan-kepentingan tersebut memiliki peranan penting dalam pembangunan India. Boleh dikatakan situasi buruk yang terjadi tidak akan berkurang dan membahayakan kesatuan dan integritas India.⁶

Kaum mayoritas Hindu India banyak didukung oleh partai nasionalis besar yang selalu mendukung segala aktivitas kelompok mayoritas. Partai tersebut adalah **Bharatiya Janata Party (BJP)**. Bharatiya Janata Party (BJP) adalah sebuah partai yang merupakan anggota dari organisasi keluarga yang dikenal dengan nama "Sangh Parivar", dan BJP adalah anggota yang paling menonjol saat ini. Dan didalam Sangh Parivar juga ada Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sebagai sebuah organisasi masanya yang mendampingi BJP dalam melakukan propaganda Hindu. RSS adalah organisasi perpaduan dari kesatuan nasional, integritas nasional, identitas nasional dan kekuatan nasional yang meliputi karakter individu dan karakter nasional, sehingga sering disebut juga sebagai kelompok nasionalis Hindu kanan dan RSS selalu dijuluki "*communal*",

⁶ D. L. Seth, " Movements,Intellectuals and the State ", *Economic and Political Weekly* 27, VIII (22 February, 1992), hlm. 25-30.

reaksioner. Partai Bharatiya Janatha Party atau ialah salah satu partai politik terbesar di India "terbentuk pada 1980"⁷. Persekutuan Demokrasi Nasional yang dikepalai oleh BJP dalam periode 1999-2004. Mr. Atal Bihari Vajpayee adalah pemimpin pertama Partai dan dia adalah Perdana Menteri India ketika BJP memegang tampuk kekuasaan. Kebanyakan pemimpin BJP dari aktivis Hindu yang berasal dari RSS sendiri. BJP menegaskan sendiri sebagai partai sekuler dan mereka selalu bertindak represif terhadap kaum minoritas terutama Muslim yang jelas bertentangan dengan ideologi Hindutva mereka. Tapi BJP mempunyai cara untuk menutupi sifat aslinya tersebut dalam perpolitikan India agar kaum minoritas tetap mau memberikan suaranya bagi BJP. Dengan taktik tipu daya dalam menangani konflik-konflik komunal yang terjadi, menjadikan BJP sebagai seorang pahlawan bagi rakyatnya.

Ketika Pemilihan Umum 1999 menempatkan **Bharatiya Janata Party (BJP)** sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak dan berhak memegang puncak kekuasaan. Dimana pada Pemilihan Umum sebelum-sebelumnya tidak pernah menang, misalnya pada Pemilu tahun 1993 Bharatiya Janata Party (BJP) mendapat kecaman dari para pemilih dikarenakan BJP terlibat dalam tragedi penghacuran Masjid Babri di Ayodhya sehingga tidak mendapatkan suara. Sejak saat itu BJP mengundurkan diri atau mencoba tidak terlibat dalam gerakan-gerakan brutal kaum Hindu yang merupakan perwujudan dari *Chauvinisme* Hindu mereka. Setelah proses pemilihan selesai diselenggarakan pada saat itu, CSDS melakukan penelitian dan hasilnya adalah menjelaskan tentang kelemahan BJP

⁷ <http://en.wikipedia.org/wiki/BJP>.

yaitu kurang diperhatikannya slogan perdamaian India yang berbunyi “mayoritas Hindu dan minoritas Muslim India menyetujui bahwa pemerintah seharusnya melindungi kepentingan-kepentingan kaum minoritas”. Maka sejak tahun 1996 BJP mulai mengurangi rasa *Chauvinisme* Hindu mereka yang berlebihan, termasuk pencabutan janji mereka tentang pembangunan kuil Hindu diatas puing-puing Masjid Babri.

Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh BJP tersebut, maka kaum Muslim mengambil langkah positif dibidang politik yaitu membangun persekutuan dengan partai-partai daerah dan yang berbasis kelas social. Dimana hal ini memberikan kaum Muslim kebebasan yang lebih dalam memilih partai – partai regional yang baru muncul seperti Samajwadi Party(SP), Bahujan Samaj Party(BSP) dan Rashtriya Janata Dal(RJD) untuk membangun koalisi baru yang terdiri dari blok – blok kasta mereka ditambah kaum Muslim menggunakan pilihan mereka guna mendominasi politik daerah.

Meningkatnya perolehan suara BJP pada Pemilu 1999 dari hanya 5% menjadi 23,75% dan total kursi yang diperoleh adalah 182 kursi. Satu alasan untuk menjelaskan kemenangan ini adalah keterkejutan masyarakat dan kesahajaan BJP mengembalikan lagi dua kunci negara yang telah hilang ketika BJP dan aliannya memegang serta menguasai tampuk pemerintahan, yaitu **Maharashtra** dan **Rajashtan**. Sekutu-sekutu BJP mendapatkan 72 kursi dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang baik bagi mereka dalam membangun pemerintahan yang bersih.

D. Pokok Permasalahan

Melihat latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari penulisan ini adalah **“Bagaimana upaya kaum minoritas Muslim untuk memperjuangkan hak mereka dalam kehidupan sosial politik di India pasca kemenangan BJP secara signifikan dalam Pemilu tahun 1999?”**

E. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah konsep-konsep yang digunakan yang saling berhubungan menurut aturan logika memadai suatu pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah. Teori sebagai suatu perangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis, yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu sama lainnya dengan data dasar sehingga dapat diamati dan dapat berfungsi sebagai wahana untuk menjelaskan fenomena yang diamati.

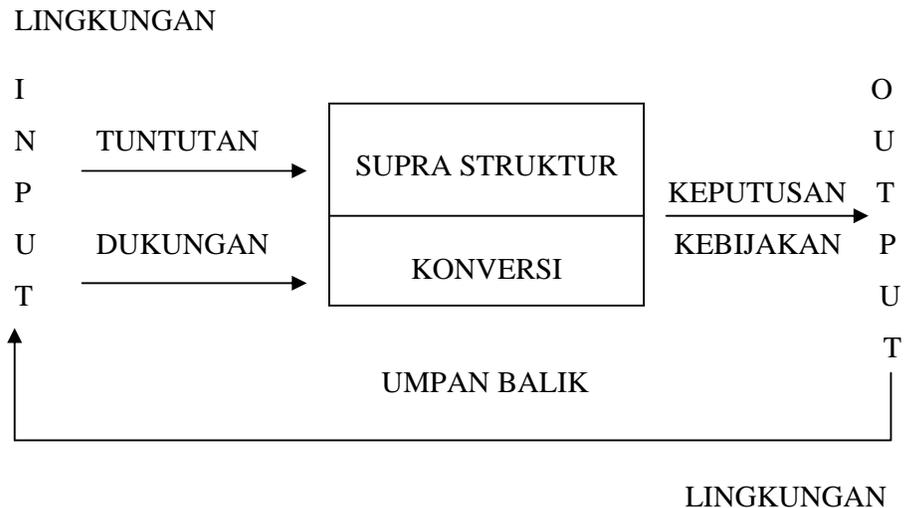
Disisi lain, teori secara dinamis harus bisa menuntun kita mencari sekumpulan faktor-faktor yang menentukan terjadinya fenomena itu.⁸

Dari definisi teori tersebut diatas, maka untuk menjelaskan permasalahan tentang peranan kaum minoritas Muslim dalam kehidupan sosial politik pasca Pemilu 1999 di India, maka penulis menggunakan **Teori Sistem Politik** sebagai acuan.

⁸ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta : LP3ES, 1990), hlm. 219.

1. Teori Sistem Politik

Berdasarkan Teori Sistem yang dikemukakan oleh David Easton dapat digunakan untuk melihat perilaku politik di India, baik mengenai pola peranan kaum minoritas Muslim maupun pemerintah India sendiri. Sebelum memahami proses yang terjadi dalam sebuah sistem politik, perlu diketahui terlebih dulu definisi konsep dari “sistem”. Secara umum, sistem dapat didefinisikan sebagai salah satu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen) yang saling berhubungan dan membentuk fungsi-fungsi tertentu. Dari definisi ini dapat diketahui paling tidak ada tiga ciri pokok yang terdapat dalam suatu sistem. *Pertama*, setiap sistem tentunya memiliki beberapa unsur (elemen). *Kedua*, unsur-unsur yang ada membentuk satu kesatuan dan berhubungan dengan struktur-struktur tertentu. *Ketiga*, struktur-struktur itu kemudian membentuk fungsi masing-masing. Untuk mengetahui lebih jelas proses yang terjadi dalam sistem politik ini, oleh David Easton telah digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut :



Sumber : Mohtar Mas' oed dan Collin MacAndrew, (Eds.), *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta), Gajah Mada University Press, 1989, hlm. 5.

Sistem politik sebagai bagian dari sebuah sistem secara umum juga memenuhi ciri-ciri tersebut. Dalam sebuah sistem politik terdapat unsur-unsur politik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam struktur tertentu. Struktur-struktur politik itu kemudian membentuk fungsinya masing-masing. Suatu sistem politik terdapat dua struktur utama, yaitu infrastruktur dan supra struktur. Infra struktur akan menjalankan fungsi input dan output yang kemudian menjadi salah satu ciri sistem politik.

Dalam wacana sistem politik, infra struktur biasanya diwakili oleh kelompok masyarakat yang bukan pemerintah (*non-government*). Ini berarti dapat diperankan oleh kelompok-kelompok masyarakat seperti partai politik, organisasi massa, kelompok-kelompok kepentingan dan bahkan juga individu yang memiliki kualifikasi tertentu dalam bidang politik.

Kaum Muslim sebagai kelompok minoritas berusaha agar mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai warga negara yang diajukan kepada pemerintahan yang berkuasa. BJP sebagai partai pemenang Pemilu 1999, dijadikan kaum minoritas Muslim untuk menampung tuntutan mereka. Islam masuk ke India tidak dengan cara kekerasan tapi melalui akulturasi yang dilakukan oleh para pedagang – pedagang Persia dengan sistem niaga. Banyak peninggalan sejarah juga yang diwariskan untuk India oleh peradaban Islam pemegang kekuasaan terdahulu. Islam pun tidak menghilangkan budaya Hindu sebagai budaya lokal masyarakat leluhur, karena mereka coba untuk berjalan berdampingan dalam konsep akulturasi budaya.

Pada dasarnya, kaum Muslim berupaya ikut berpartisipasi dalam meredakan konflik agama yang selama ini melanda India. Mereka tidak ingin dikecewakan oleh pemerintahan India, seperti terjadinya tragedi Masjid Babri pada tahun 1992 yang memakan banyak korban jiwa. Sehingga secara tidak langsung kaum Muslim pun membantu kemenangan BJP dalam Pemilu, karena pasca tragedi tersebut kaum Muslim keluar dari keanggotaan partai Kongres yang merupakan rival kuat dari BJP. Kaum Muslim merasa dikecewakan dan kemudian lebih memilih untuk membentuk koalisi baru dalam pemilihan yaitu Samajwadi Party(SP), Bahujan Samaj Party(BSP) dan Rashtriya Janata Dal(RJD). Karena bagi partai Kongres suara kaum Muslim sangat krusial dampaknya bagi partai tersebut.

BJP mengeluarkan kebijakan dan berjanji menanggapi tuntutan kaum Muslim India. Mereka mengeluarkan kebijakan persamaan hak warga negara

mendapatkan kehidupan sosial politik yang kondusif berdampingan dengan kelompok lain. Dibawah pimpinan Atal Bahari Vajpayee, BJP berupaya bersikap sebagai kelompok nasionalis tanpa memihak kesatu pihak. Itu yang dijanjikan oleh BJP kepada masyarakat India dalam tujuan partai yang sering dikampanyekan pada saat pemilihan, sekarang coba diwujudkan. Dengan harapan India terlepas dari konflik komunal etnis.

Perbedaan antara minoritas dan mayoritas di India sampai pada satu tingkat yang sangat luar biasa. Juga tidak dapat disangkal bahwa konfrontasi berulang antara dua komunitas ini menghasilkan kemunduran yang sangat parah dari negara itu sendiri secara keseluruhan, sehingga menimbulkan penghambatan ditingkat nasional. Dalam peta komunalisme di India, kaum minoritas Muslim selalu berada posisi sebagai objek atau korban dan selalu terpojokkan dalam kehidupan sosial politiknya karena intimidasi dari kelompok mayoritas Hindu tidak pernah berhenti. Mereka bukan saja melakukan penyerang terhadap individu-individu Muslim saja, melainkan juga meakukan pengrusakan dan pembakaran rumah-rumah, toko-toko, tempat-tempat industri dan lahan pertanian milik kaum Muslim. Kerusakan-kerusakan tersebut terus berlanjut dari sejak tragedy Ayodhya kemudian berlanjut pada tanggal 5 Februari 2000, terjadi peledakan bom di pemukiman Muslim di Padli, Ahmedabad. Tragedi masih terus mengikuti kaum Muslim, pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 kerusakan itu terjadi kembali di Gujarat yang tidak hanya memakan korban jiwa saja tapi juga materi kaum Muslim⁹.

⁹ <http://www.sabrang.com/cc/comold/april00/co-story.htm>, paragraph ke-3.

Dalam posisi yang termarginalkan kaum Muslim tidak menyerah pada keadaan. Mereka tetap berupaya untuk terus memperjuangkan dan meroleh kembali hak-hak mereka sebagai warga negara yang selama ini selalu diabaikan oleh pemerintah. Melalui berbagai cara dilakukan untuk memperjuangkan hal tersebut, baik dari kalangan kaum Muslim sendiri ataupun dari komunitas/organisasi yang peduli terhadap nasib kelompok-kelompok minoritas yang ada di India. Dari kalangan kaum Muslim sendiri, mereka memiliki organisasi All India Muslim Majlis-E-Mushawarat (AIMMM). AIMMM sendiri didirikan pada tahun 1965, adalah forum mewakili masyarakat Muslim di India untuk konsultasi dan pertimbangan atas hal-hal yang menyangkut keprihatinan yang menimpa masyarakat Muslim itu sendiri. AIMMM memiliki objek dan tujuan yaitu untuk melindungi dan membela identitas dan martabat masyarakat Muslim serta hak-hak Konstitusional dan manusiawinya, secara istimewa Haknya sampai memperoleh hak kesetaraan, keadilan dan kehidupan yang aman atau perlindungan dari pemerintah. AIMMM tidak akan berfungsi sebagai Partai Politik dan tidak akan mengambil bagian dalam pemilihan. Tetapi, akan berfungsi sebagai pemantau perkembangan, sebagai golongan berpengaruh dan sebagai pemberi nasihat. Melalui Shri Syed Shahabuddin, presiden All Indian Muslim Majlis-e-Mushawarat, mereka berkampanye untuk memperjuangkan hak kaum Muslim yang selama ini terabaikan oleh pemerintah sampai Syeh Shahabuddin menyerang pemerintahan BJP yang telah dianggap sebagai “musuh” Muslim. Seketika itu juga Pemerintahan BJP mengatakan mereka akan berusaha untuk memperhatikan

kaum minoritas Muslim dan mencegah terjadinya kerusuhan-kerusuhan komunal yang dilakukan oleh kelompok garis keras Hindu¹⁰. Selain itu di Ahmedabad, dikirimkan sederetan petisi surat perintah atas nama People's Union for Civil Liberties (PUCL) yang ditujukan pada Pengadilan Tinggi Gujarat, yang dipimpin Haroobhai Mehta, meminta supaya Pengadilan Tinggi melakukan intervensi dalam melindungi hak-hak pokok seorang warganegara India yang termasuk hak mendapatkan kesetaraan yang adil untuk menetap dan bertempat-tinggal di mana pun di India (Artikel 19 (1) (d)) dan hak kehidupan yang termasuk hak untuk melindungi dan mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah diperoleh kaum mayoritas selama ini. Tidak ketinggalan juga, para ulama Muslim pun mengeluarkan pernyataan dalam setiap khutbah-khutbah mereka untuk mendukung pemerhatian atas kaum Muslim oleh pemerintah yang berkuasa. Seperti yang dilakukan oleh Maulana Syed Ahmed Bukhari, Imam Shahi Jama Masjid di New Delhi. Beliau mengatakan bahwa demokrasi berbicara bahasa warganegara, tak ada Hindus dan orang Muslim. Tetapi jika Thackerays, pimpinan Shiv Sena dan Singhals Hindutva bersikeras untuk tetap membawa India kembali seperti era pra-demokratis yang pramodern, kaum Muslim tetap memilih persatuan bukan hal yang berbeda. Dan beliau juga menjawab atas pernyataan yang dikeluarkan oleh sangh parivar untuk melakukan penyerangan kedua di Ayodhya, imam sudah mengancam dia akan mengerahkan anggota organisasi Muslim seluruh dunia (OIC) yang memiliki kepentingan disini untuk

¹⁰ [http : //www.mushawarat.com](http://www.mushawarat.com)

memaksakan sanksi ekonomi pada India¹¹. Pernyataan Syed dikemukakan untuk menanggapi pernyataan Thackerays yang menyatakan kaum Muslim India merupakan ancaman keamanan nasional Negara. Padahal kaum Muslim India dalam sejarah perkembangan Negara ini banyak memberi kontribusi demi kemajuan Negara. Tapi kaum Muslim tetap berjuang keras untuk memperoleh hak-haknya kembali sebagai warga Negara.

F. Hipotesa

Hipotesa adalah proposisi yang memiliki dukungan teoritis tetapi tidak didukung oleh fakta yang empiris. Selanjutnya hipotesa itu akan diuji dan hasil pengujian itu akan diinduksikan kedalam teori sebagai hukum.¹²

Setelah memahami perumusan masalah sekaligus permasalahan dasar serta kerangka dasar teori, maka dapat ditarik hipotesa bahwa peranan kaum minoritas Muslim dalam kehidupan sosial politik di India pasca Pemilu 1999 adalah: (berisi point-point upaya kaum Muslim):

1. mengajukan tuntutan pada BJP sebagai pemenang Pemilu 1999 agar lebih memperhatikan lagi dan mengembalikan hak-hak kaum minoritas yang selama ini direbut oleh kaum mayoritas Hindu

¹¹ <http://www.sabrang.com/cc/archive/2001/jan01/saffron.htm>

¹² Mas' oed, *Op. cit.*, hlm. 219.

2. mengamati pelaksanaan pemenuhan tuntutan atas hak-hak kaum minoritas yang diajukan kaum Muslim India pada pemerintahan yang berkuasa yaitu BJP demi mencapai kehidupan yang damai.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian “ Peranan Kaum Minoritas Muslim dalam Kehidupan Sosial Politik pasca Pemilu 1999 di India” dibatasi pada pola kehidupan sosial politik. Mengenai peranan kaum minoritas Muslim dan adanya dominasi kaum mayoritas Hindu yang selalu mendiskreditkan kaum minoritas dalam kehidupan sosial politik di India dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004.

Namun demikian, penulis merasa perlu untuk membatasi waktu pembahasan agar bisa mempertajam analisa mengenai peranan kaum minoritas Muslim dalam kehidupan sosial politik di India dan tidak menutup kemungkinan dalam penganalisaan nanti tidak sedetail pengaplikasian penelitian sesungguhnya, akan tetapi diusahakan untuk tetap relevan.

H. Tehnik Penelitian

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah *Library Research* dengan memanfaatkan data-data sekunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, lewat internet yang telah diolah menjadi data dan bisa dijadikan bahan kajian dalam penyusunan skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Bab I :

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Tehnik Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II :

Merupakan penjelasan dan penjabaran yang lebih spesifik dari latar belakang masalah peranan sosial politik kaum minoritas Muslim di India, dari awal masuknya agama Islam sampai menjelang pemilu 1999 di India.

Bab III :

Merupakan penjelasan dan gambaran tentang pelaksanaan pemilu 1999 di India, meliputi kondisi sosial politik masyarakat, peserta pemilu, pelaksanaan pemilu dan hasil dari pemilu 1999 di India itu sendiri.

Bab IV :

Merupakan penjelasan mengenai peranan umat Muslim sebagai kelompok minoritas untuk memperoleh kesetaraan hak dalam kehidupan sosial politik pasca Pemilu 1999 di India.

Bab V :

Berupa kesimpulan yang memuat rangkuman dari bab-bab sebelumnya beserta argumen-argumen yang digunakan dalam seluruh penulisan.

